

Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pilkada

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan Maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Senin (21/9), membenarkan diterbitkannya maklumat tersebut.

Dengan adanya maklumat itu, seluruh peserta pilkada diharapkan bisa mematuhi standar protokol kesehatan dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut. Irjen Argo optimis dengan menerapkan protokol kesehatan dapat menekan dan mencegah terjadinya penyebaran klaster baru COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. “Diharapkan dengan adanya Maklumat Kapolri ini bisa menekan sekecil mungkin klaster di tahapan Pilkada,” tutur Argo.

Isi Maklumat Kapolri nomor: Mak/3/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 itu yakni:

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi Undang-undang, maka diperlukan penegasan



Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri me-

ngeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang

terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan Kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

(ANTARA)

Reisa: Terapi oleh Tenaga Medis Efektif Sembuhkan Pasien COVID-19

JAKARTA - Juru bicara Pemerintah Reisa Broto Asmoro mengatakan terapi yang selama ini diberikan tenaga medis terbukti ampuh menyembuhkan pasien COVID-19. Hal itu disampaikan Reisa menyusul meningkatnya jumlah pasien yang selesai menjalankan isolasi di rumah sakit.

“Jumlah kasus selesai isolasi COVID-19 pada pekan ketiga September meningkat dibanding pekan sebelumnya. Ini berarti terapi yang diterapkan tenaga medis di Indonesia efektif,” kata Reisa dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9).

Reisa mengatakan terapi efektif itu antara lain mulai dari pemberian obat yang menekan infeksi virus di tubuh pasien, mempercepat masa penyembuhan, mengurangi risiko kematian termasuk menguatkan imunitas



Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro

tubuh pasien baik melalui kombinasi obat yang optimal maupun asupan gizi seimbang.

Dia mewakili pemerintah berterima kasih kepada seluruh dokter, perawat,

tenaga medis, ahli farmasi dan ahli gizi, yang tekah bekerja keras membantu pasien COVID-19 untuk kembali sembuh.

Kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga pukul 12.00 WIB, Senin, kembali di atas 4 ribu orang per harinya atau angka tepatnya 4.176 kasus sehingga total menjadi 248.852 kasus. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 yang diterima di Jakarta, Senin pasien sembuh bertambah 3.470 orang dengan total pasien COVID-19 yang berhasil pulih menjadi 180.797 orang. Sementara untuk kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia bertambah 124 jiwa menjadi 9.677 kematian.

(ANTARA)

Pariwisata di Yogyakarta Mulai Menggeliat

YOGYAKARTA - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Singgih Raharjo mengklaim industri pariwisata di provinsi tersebut mulai menggeliat dengan kunjungan wisata yang masih didominasi wisatawan lokal.

“Kalau dari sisi geliat ekonominya, kondisi pariwisata di DIY sudah menggeliat,” kata Kepala Dispar DIY Singgih Raharjo di Yogyakarta, Senin (21/9).

Menurut Singgih, geliat sektor pariwisata di DIY setidaknya tampak dari data kunjungan wisata yang terekam melalui aplikasi Visiting Jogja periode Agustus-September 2020 dengan rata-rata 5.000-6.000 wisatawan per hari.

Setiap akhir pekan jumlah kunjungan wisata itu terus meningkat menjadi rata-rata 20 ribuan pada hari Sabtu dan pada Minggu meningkat menjadi 30 ribu-40 ribu. “Setiap minggu saya lihat trennya seperti itu,” kata Singgih.

Berdasarkan data asal daerahnya, menurut dia, sebagian besar wisatawan yang mengunjungi DIY masih didominasi wisatawan lokal di DIY, diikuti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan terakhir DKI Jakarta.

Meski kunjungan wisata meningkat, Singgih meminta



FOTO ANTARA/Lugman Hakim

Kepala Dispar DIY Singgih Raharjo

sesnya banyak,” kata dia.

Hingga saat ini, menurut dia, DIY masih memberlakukan uji coba operasional destinasi wisata secara terbatas yakni dengan membatasi jumlah wisatawan 50 persen dari kapasitas maksimal destinasi dan wisatawan dari zona merah diwajibkan menyertakan hasil rapid test nonreaktif.

“Kemudian untuk (rombongan) wisatawan dengan jumlah besar kami juga masih belum menerima. Jadi saya kira itu filter kita untuk lebih mengimplementasikan protokol kesehatan yang sudah kita siapkan dalam Pranatan Anyar Plesiran Jogja,” kata dia.

(ANTARA)



ANTARA/HO-Dinas Kominfo Kab Wonosobo

Sejumlah orang yang terjaring operasi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Wonosobo diberi sanksi sosial membersihkan lingkungan pasar induk Wonosobo.

Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonosobo Diberi Sanksi Bersihkan Pasar

WONOSOBO - Sekitar 40 orang yang terjaring operasi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, diberikan sanksi sosial membersihkan lingkungan pasar induk Wonosobo.

Kabid Ketertarikan dan Ketertiban Umum Satpol PP Wonosobo Hermawan Animoro di Wonosobo, Senin (21/9), mengatakan sebelumnya mereka diberikan pemahaman terkait pentingnya menaati protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo.

Hermawan menyebutkan upaya memberikan sanksi administratif berupa bersih-bersih lingkungan pasar agar mereka yang telah melanggar aturan protokol kesehatan serta tidak

menaati jam malam, ke depan tidak lagi mengulangi kesalahannya.

“Penerapan sanksi masih sebatas administratif berupa hukuman sosial dengan turut membantu upaya menjaga kebersihan sekitar pasar induk dan kawasan kota. Hal ini untuk menggugah kesadaran akan bahaya virus corona,” katanya.

Menurut dia, nanti pihak Satpol PP akan menambah sanksi tersebut, antara lain dengan mewajibkan setiap pelanggar untuk membersihkan sungai, selokan maupun got.

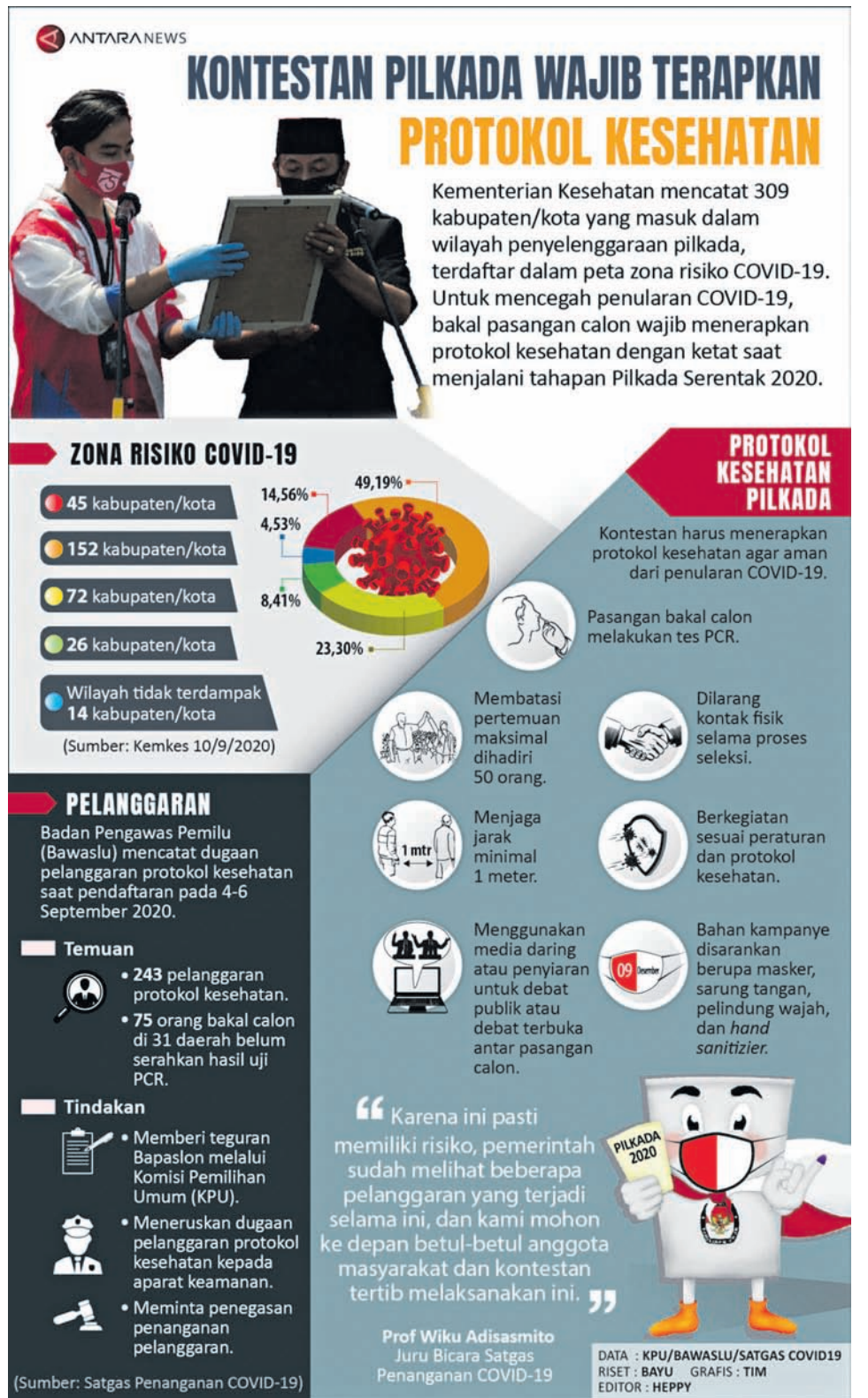
Demi mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di Wonosobo, Satpol PP bersama TNI, Polri, dan sejumlah unsur di Gugus Tugas Kabupaten Wonosobo terus

menggencarkan operasi penerapan protokol kesehatan.

Ia menyebutkan hingga pekan ketiga bulan September 2020 pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan telah menjaring sebanyak 4.232 orang yang tidak patuh. Menurut dia, sejumlah lokasi keramaian, mulai dari kawasan kota hingga ke wilayah-wilayah dengan kerawanan tinggi akan terus disisir.

“Sasaran operasi, selain warga tidak patuh protokol kesehatan juga tempat-tempat usaha yang diketahui belum melengkapi fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan, aturan jaga jarak hingga beroperasi di luar batas jam malam,” katanya.

(ANTARA)



Yogyakarta Perketat Pengawasan Ibu Hamil Antisipasi Penularan COVID-19

YOGYAKARTA

Pengawasan terhadap kondisi kesehatan ibu hamil di Kota Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19 diperketat sebagai salah satu upaya untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat termasuk terhindar dari paparan virus corona.

“Secara medis, kondisi ibu hamil memang rentan terhadap paparan berbagai penyakit karena daya tahan turun. Makanya, pengawasan perlu diperketat,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, Kota Yogyakarta sudah memiliki sistem untuk mendukung pemantauan kesehatan terhadap ibu hamil yang sudah berjalan baik bahkan jauh sebelum terjadi pandemi COVID-19. Ibu hamil wajib melapor ke wilayah sebagai bagian dari pendataan untuk kemudian masuk dalam pemantauan kader dan mendapat berbagai bekal menjaga kesehatan kehamilan termasuk persiapan kelahiran.

“Biasanya mereka dimasukkan dalam grup percakapan yang di dalamnya juga ada dokter sehingga bisa menjawab berbagai permasalahan yang diala-

mi ibu hamil,” katanya.

Pendataan tersebut juga menjadi bagian informasi di kecamatan yang harus mempersiapkan berbagai dokumen saat ibu hamil melahirkan, seperti akta kelahiran, kartu identitas ada dan perubahan kartu keluarga (KK). “Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, ibu hamil diwajibkan melakukan uji swab saat usia kehamilan 38 minggu,” katanya.

Dari sejumlah uji swab yang dilakukan terhadap ibu hamil, lanjut Heroe, ditemukan sekitar 10 ibu hamil yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. “Uji swab ini tidak hanya ditujukan untuk mengetahui status kesehatan ibu hamil tetapi juga merupakan upaya un-

tuk menjaga kesehatan tenaga medis yang nantinya membantu menangani persalinan supaya tidak terpapar karena bisa melakukan persiapan sesuai kondisi kesehatan ibu hamil,” katanya.

Ibu hamil yang diketahui terpapar COVID-19 tersebut, lanjut Heroe, memiliki beragam latar belakang, yaitu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja tetapi ada juga pedagang dan karyawan.

“Makanya, yang perlu dilakukan saat ini adalah menerapkan protokol kesehatan dengan baik di mana saja, dan kapan saja termasuk di rumah dan kantor. Potensi penularan itu bisa terjadi di mana saja,” katanya.

(ANTARA)



ANTARA/HO

Kegiatan penukaran sampah anorganik dengan sayuran bagi ibu hamil dan balita.